BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Rencana strategis yang telah disusun harus diukur keberhasilannya. Dengan demikian kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan harus dituangkan dalam bentuk satuan yang dapat diukur. Pengukuran atas rencana strategis dapat dilakukan secara berjenjang. Pengukuran pertama yang dijabarkan dalam sasaran tahunan adalah sangat menentukan apakah sasaran yang harus dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Sedangkan pengukuran jenjang selanjutnya adalah untuk menentukan apakah sasaran yang telah dicapai sudah mengarah pada tujuan yang akan dicapai. Pengukuran pencapaian tujuan baru dapat dilakukan setelah beberapa sasaran tahunan bersangkutan telah dicapai.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan program yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan serta sarana dan prasarana.

Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Indikator output dan outcome sebagian besar bersumberkan pada laporan hasil kegiatan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama Badan Penghubung Daerah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembanguan daerah.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja langkah kegiatannya dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dapat dilakukan dengan jalan melakukan analisis - analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Dengan melakukan evaluasi atas indikator kinerja dari mulai kebijakan, program sampai dengan kegiatan maka diharapkan dapat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Sebab sebab tidak tercapainya target berupa kendala dan hambatan yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan
- Penggunaan sumber daya yang dimiliki
- Efisiensi, efektifitas dan kehematan penggunaan sumberdaya.

Dalam menentukan hasil evaluasi/capaian kinerja digunakan skala pengukuran koordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 = Sangat Berhasil
70 s/d 85 = Berhasil
55 s/d 70 = Cukup Berhasil
< 55 = Kurang Berhasil

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator input, output dan outcome antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena adanya perbedaan antara realisasi dengan yang direncanakan.

Metode Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

b. Apabila realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator - indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Tingkat capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua tahun 2024 digambarkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja program sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua tahun 2024. Jumlah program dalam Rencana Kerja tahun 2024 sebanyak 2 (Dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan/indikator. Dapat dikemukakan capaian outcome sasaran strategis tahun 2024 mencapai 96%. Sementara untuk Tahun Anggaran 2024 karena Aplikasi baru (SIPD) terdapat 2 (dua) Program dengan jumlah kegiatan 5 (lima) kegiatan/indicator dengan capaian outcome sasaran strategis tahun 2024 mencapai 96%.

Ringkasan capaian Indikator Kinerja Program tersebut adalah:

NO	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	BOBOT (%)						
1	2	3	4	5						
Α	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	91,00							
	Provinsi, dengan Kegiatan									
1	Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	91,00							
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	100,00							
3	Pemyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	3	97,00							
	Daerah									
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa	3	98,00							
	Pemerintah Daerah									
В	Program Pelayanan Penghubung	1	100,00							
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1	100,00							
Capaian outcome sasaran strategis tahun 2024 berdasarkan capaian 2 (dua)										
program yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja										

Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan diuraikan dibawah ini. Sistematika uraian sedapat mungkin menggambarkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik yang terangkum dalam program yang sudah ditetapkan maupun kegiatan yang tidak direncanakan dan tidak tertuang dalam Rencana Kinerja 2024. Tahun 2024 Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua telah menetapkan 5 (Lima) program strategis yang akan dicapai melalui kegiatan yang dananya dialokasikan dalam APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024, sebesar Rp. 8.158.839.845,00 yang terdiri dari :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	6.658.839.845,00
	Provinsi sebesar		
2.	Program Pelayanan Penghubung sebesar	Rp.	1.500.000.000,00

3.3. ASPEK KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA

a. Keuangan

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2024 mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.158.839.845,00 terdiri dari : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusa Pemerintah Daerah Provinsi	6.658.839.845,00	6.310.416.854,00	95,00
	Administasi Keuangan Perangka Daerah	t 3.425.551.845,00	4.114.889.335,00	91,00
	Adminsitrasi Umum Perangka Daerah	t 1.858.688.000,00	1.856.784.878,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjar Urusan Pemerintah Daerah	857.300.000,00	832.742.433,00	97,00
	Pemeliharaan Barang Mil Daerah Penunjang Urusa Pemerintah		506.000.208,00	98,00
2	Program Pelayana Penghubung	1.500.000.000,00	1.497.909.824,00	100,00
	Pelaksanaan Pelayana Penghubung	1.500.000.000,00	1.497.909.824,00	100,00

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

 Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan
 Jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua menurut pangkat dan golongan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Eselon					Pangkat/Golongan									Iumlah			
/Tingkat	IV			III			II			I				Jumlah			
an	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
II	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		0
III	-	-	-	-	-	-	•	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV	2	-	-	-	-	-	•	2	-	-	-	-	-	-	-		4
Staf	1	•	•	•	1	2	5	7	0	0	1	2	0	0	1	0	19

PPPK	1									1							
CPNS		7									7						
Tenaga Kontrak		17								17							
TOTAL	3	-	-	-	-	1	5	10	0	0	1	2	0	0	1	0	49

 Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
 Jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua menurut tingkat pendidikan per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Eselon / Tingkatan	Tingkat Pendidikan											
Escion / Tingkatan	S3	S2	S 1	DIII	SLTA	SLTP	SD					
II	•	•	•	•	•	1	1	-				
III	-	-	1	-	-	•	•	1				
IV	•	3	1	•		•	•	4				
Staf	•	0	14	1	3	1	•	19				
PPPK	-	-	-	-	1	-	-	1				
CPNS	-	-	2	-	5	-	-	7				
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	17	-	-	17				
Jumlah	-	4	18	1	26	1	-	49				

Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin
 Jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua menurut Jenis kelamin per
 Desember 2024 dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH			
1	Laki-laki	32	Orang		
2	Perempuan	17	Orang		
	Jumlah Pegawai seluruhnya	49	Orang		

c. Sarana Penunjang Lainnya

Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua ditunjang dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang meliputi antara lain yaitu:

1) Gedung Kantor

- Kantor Badan Penghubung Daerah bertempat di Jalan Suryo Nomor 60 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.12180
- 2. Gedung Anjungan Papua, Gedung Penginapan dan Gedung Serba Guna serta gedung perkantoran di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta

2) Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang di miliki oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua adalah kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua). Disamping kendaraan operasioanal yang sudah tersedia dari tahun - tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua, tidak melaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional..

3) Barang Inventaris berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelancaran dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari - hari pada Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua sangat didukung oleh kelengkapan peralatan kerja yang ada, untuk itu Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua secara bertahap berusaha melengkapi kebutuhan peralatan kerja bagi seluruh staf. Disamping sarana dan prasarana kantor yang sudah tersedia dari tahun-tahun sebelumnya,

3.4 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

a. Evaluasi LAKIP

Menyeluruh atas apa yang di laporkan/ dihasilkan, pencapaian hasil kegiatan program kebijakan, keselarasan dengan Visi dan Misi Organisasi Akuntabilitas

Keuangan, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan baik oleh evaluator internal instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sebagian atas penilaian kinerja kegiatan, program kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Hal ini sering dilakukan evaluator internal instansi pemerintah yang bersangkutan dengan membuat penilaian model skoring yang menghasilkan nilai akhir capaian kinerja.

b. Evaluasi Komponen Sistem AKIP

Menggunakan teknik kriteria referrenced survey yaitu menggunakan kriteria - kriteria yang di tetapkan berdasarkan pada kebenaran normatif yang :

- 1. Seharusnya dilakukan menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP
- 2. Bersumber pada buku buku petunjuk mengenai AKIP
- 3. Bersumber pada better practice atau best practice baik di Indonesia.
- 4. Bersumber pada berbagai praktek manajemen strategis, manajemen kinerja dan sistim manajemen yang baik

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi difokuskan pada capaian sasaran, dengan melihat capaian target indikator sasaran

- > Pembanding yang di lakukan
 - Kinerja nyata dengan kinerja yang di rencanakan
 - Kinerja nyata dengan kinerja tahun tahun sebelumnya
 - Kinerja instansi dengan kinerja instansi lain
- Analisa efisiensi membandingkan antara output dengan input
- Analisa efektivitasnya, kesesuaian tujuan dengan hasil manfaat atau dampak
- d. Inti Simpulan Hasil Evaluasi
 - Mengumpulkan capaian kinerja
 - Melihat skala implementasi sistem dan pengukuran kinerja
 - Mengidentifikasi tindak lanjut/ perbaikan